

TERPILIHNYA ANWAR IBRAHIM SEBAGAI PERDANA MENTERI DAN HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA

Sita Hidriyah

Abstrak

Anwar Ibrahim terpilih sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia yang baru menggantikan PM sebelumnya, Ismail Sabri Yaakob. Masyarakat Malaysia berharap Anwar Ibrahim dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Malaysia setelah yang bersangkutan diangkat sebagai PM yang baru. Tulisan ini membahas secara singkat proses pemilu di Malaysia yang baru saja berlangsung dan hubungan Indonesia-Malaysia setelah terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM. Hasil pemilu Malaysia kali ini, yang mengantarkan Anwar Ibrahim sebagai PM, dapat dipahami sebagai kompromi politik terbaik dalam upaya Malaysia bangkit dari keterpurukan politik dan berbagai persoalan ekonomi di dalam negeri. Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM diharapkan membawa perubahan dan perbaikan bagi Malaysia. Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM juga menjadi momentum bagi penguatan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Hubungan baik yang telah terbina antara Anwar Ibrahim dengan berbagai tokoh Indonesia diharapkan dapat bermanfaat untuk mempererat hubungan serta kerja sama antarkedua negara. Kedua negara perlu membuat program kerja sama untuk kepentingan bilateral serta kemajuan kawasan.

Pendahuluan

Pemilu Malaysia dilaksanakan pada tanggal 19 November 2022, satu tahun lebih cepat dari rencana yang seharusnya dilaksanakan pada bulan September 2023. Pada pemilu kali ini, beberapa koalisi partai yang terlibat dalam pemilihan adalah koalisi yang sebelumnya berkuasa, yaitu Barisan Nasional yang dipimpin Partai Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), koalisi Pakatan Harapan

(PH) di bawah pimpinan Anwar Ibrahim, serta koalisi Perikatan Nasional (PN) di bawah pimpinan mantan PM Muhyiddin Yassin. Hasil pemilu menunjukkan, tidak ada partai yang memenangkan kursi mayoritas sehingga Malaysia harus menghadapi parlemen gantung atau *hung parliament* untuk pertama kalinya. Hal ini menyebabkan koalisi yang memegang suara paling unggul diharuskan menggandeng koalisi lainnya.



Setelah melalui berbagai pertimbangan, kabinet baru Malaysia yang dipimpin PM Anwar Ibrahim akhirnya terbentuk dan dilantik di Istana Negara pada Sabtu sore, 3 Desember 2022. Kabinet memiliki 28 anggota, termasuk Datuk Seri Anwar dan dua wakil PM, yakni Ahmad Zahid Hamidi dari Barisan Nasional dan Fadillah Yusof dari Gabungan Parti Sarawak. Selain menjabat sebagai PM, Anwar juga menduduki pos Menteri Keuangan (Media Indonesia, 4 Desember 2022). Dalam konteks hubungan bilateral dengan Indonesia, terpilihnya Anwar sebagai sebagai PM, membuka harapan bagi terjalinnya hubungan Indonesia dan Malaysia yang lebih baik. Kedekatan Anwar dengan Indonesia menjadi modal bagi pengembangan dan peningkatan hubungan kedua negara yang bertetangga dekat ini, termasuk mengupayakan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam hubungan bilateral kedua negara. Tulisan ini membahas secara singkat proses pemilu di Malaysia yang baru saja berlangsung dan bagaimana hubungan Indonesia-Malaysia setelah terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM.

Proses Pemilu Malaysia 2022

Pemilu yang berlangsung di Malaysia pada 19 November 2022 merupakan pemilu yang dilaksanakan setahun lebih cepat dari jadwal seharusnya pada tahun 2023. Jadwal pemilu tersebut merupakan keputusan akhir rapat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilu Malaysia pada 20 Oktober 2022, sepuluh hari setelah

mantan PM Ismail Sabri Yaakob membubarkan parlemennya (Media Indonesia, 19 November 2022). Ismail membubarkan parlemen agar bisa menggelar pemilu secepatnya dikarenakan konstelasi politik yang semakin memanas dan tekanan terhadap pemerintahan Ismail yang semakin kuat yang tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam partai, antara koalisi Ismail yaitu Barisan Nasional (BN) dengan kelompok oposisi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Berdasarkan aturan Malaysia, pemilu harus langsung digelar dalam waktu 60 hari setelah parlemen dibubarkan. Selain itu, pemilu juga harus dilaksanakan untuk kelancaran proses demokrasi dan penghematan biaya sehingga rakyat tidak terbebani serta untuk meredam suara-suara yang selama ini mengkhawatirkan pemerintah. Pemilu Malaysia kali ini memang telah menimbulkan antusiasme warga Malaysia. Hal itu terlihat dari antrean panjang warga pada lokasi-lokasi tempat pemungutan suara, dan hal tersebut bisa ditafsirkan juga sebagai adanya keinginan besar dari warga untuk terjadinya perubahan di Malaysia. Warga yang memiliki hak pilih dipersilakan memilih empat kandidat, dan mereka adalah Ismail Sabri Yakoob dari BN, Anwar Ibrahim dari PH, Muhyidin Yassin dari PN, dan Ahmad Zahid Hamidi dari UMNO.

Hasil pemilu menunjukkan keunikan dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu tidak ada pemenang pemilu mayoritas. Sulitnya penentuan PM baru Malaysia terjadi karena pertama kali dalam sejarah, pemilu menghasilkan parlemen menggantung. Tidak ada

satu partai pun yang mendapat suara mayoritas di parlemen. Koalisi PH yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim memenangkan 82 kursi. Partainya masih membutuhkan dukungan dari 30 anggota parlemen lagi untuk mengamankan 112 kursi. Di sisi lain, pesaingnya koalisi PN yang dipimpin oleh mantan PM Muhyiddin Yassin, memenangkan 73 kursi. Sementara koalisi BN, yang didominasi oleh UMNO, di urutan ketiga dengan 30 kursi. Keunikan kedua adalah saling klaim kemenangan. Anwar Ibrahim mengklaim telah mendapat dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintahan, begitu pula dengan lawannya, Muhyiddin Yassin juga mengklaim kemenangan yang sama. Pada akhirnya keputusan diambil oleh Raja Abdullah, yang memanggil semua pemimpin koalisi partai ke istana untuk menemukan titik temu yang memadai.

Keunikan lain pada pemilu kali ini tidak terlepas dari beragam permasalahan yang terjadi di Malaysia. Permasalahan yang selalu muncul adalah isu ras dan agama di tengah penduduk Malaysia yang mayoritas muslim dan beretnis Melayu (tempo.co.id., 22 November 2022). Sejumlah pemilih secara terang-terangan menolak koalisi Barisan Nasional yang memegang kekuasaan politik sudah sejak lama. Sedangkan koalisi Perikatan Nasional yang menargetkan Melayu muslim banyak diminati. Dari sini sudah terlihat jika isu ras masih mendominasi dan isu inilah yang nantinya akan menguji elektabilitas kerja dari seorang Anwar Ibrahim untuk dapat menangani permasalahan tersebut.

Terlepas dari isu ras, masalah lain yang menjadi pekerjaan Anwar adalah anggaran untuk tahun depan yang diusulkan sebelum pemilihan sudah diadakan tetapi belum disahkan. Untuk mengatasi isu tersebut, Anwar akan mengadakan sidang parlemen pada 19 Desember 2022 untuk mosi percaya untuk membuktikan dukungan mayoritas parlemen terhadapnya di Majelis Rendah. PM Anwar Ibrahim dalam pidatonya pasca-pelantikan menyatakan kepada semua jajaran pemerintahannya untuk bekerja keras dalam menyelamatkan negara. Berjalan pelan dan berliku tetapi pasti merupakan langkah Anwar dalam upayanya kali ini yang berhasil membawanya menjadi seorang PM Malaysia.

Hubungan Indonesia-Malaysia

Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM Malaysia diperkirakan akan mempererat hubungan Indonesia-Malaysia. Malaysia adalah negara tetangga Indonesia yang kerap melakukan pertemuan rutin bagi hampir semua lapisan pemerintahan dari tingkat pemimpin hingga menteri. Anwar sendiri dikenal sebagai sahabat Indonesia sejak lama karena memiliki hubungan baik dengan banyak teman serta sahabat di Indonesia dan rutin bersilaturahmi dengan para pemimpin pemerintahan dan nonpemerintahan. Presiden Joko Widodo bahkan menjadi kepala negara pertama yang mengucapkan selamat atas pengangkatan Anwar Ibrahim sebagai PM Malaysia (setkab.go.id., 25 November 2022). Dalam pernyataan di sosial media, Anwar menegaskan jika Indonesia merupakan sahabat sejati Malaysia

sehingga ingin memperkokoh persahabatan serta meningkatkan hubungan dalam bidang perdagangan, bisnis, investasi, budaya dan tenaga kerja, khususnya perlindungan pekerja. Banyak WNI di Malaysia juga mengharapkan jika PM terpilih dapat memajukan hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam persoalan pekerja migran.

Beragam tantangan memang akan dihadapi oleh PM Malaysia terpilih, begitu juga pada hubungan Indonesia-Malaysia. Mulai dari isu ekonomi termasuk perdagangan, pekerja migran, perbatasan, dan stabilitas kawasan. Tantangan stabilitas kawasan, yaitu bagaimana kedua negara akan memposisikan diri di kawasan. Hal ini terkait dengan posisi Indonesia yang saat ini mengetuai ASEAN. Kedua negara bertetangga dekat, dan sebagai pendiri ASEAN, diharapkan mampu memperkuat ASEAN dan dapat bekerja sama dalam menyelesaikan beragam permasalahan yang masih terjadi di kawasan, seperti dalam menangani masalah pengungsi Rohingya dan krisis politik di Myanmar. Selain itu, posisi penting sejumlah negara tetangga lainnya diharapkan dapat mendorong kedua negara untuk meningkatkan perdagangan dan investasi tidak hanya di antara negara-negara anggota ASEAN sebagai basis di kawasan, tetapi juga dengan Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara lainnya.

Untuk isu pekerja migran Indonesia (PMI), kedua negara harus bisa mencari solusi atas masih terjadinya eksploitasi dan praktik perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Malaysia harus segera

membangun sistem informasi terpadu bagi PMI. Perbaikan pada MoU memang penting, tetapi kedua belah pihak juga harus berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat perlindungan bagi PMI. MoU Indonesia-Malaysia nantinya akan menjadi tolok ukur bagi pembuatan nota kesepahaman dengan negara tujuan lain, seperti Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Arab Saudi, Kuwait, dan lainnya.

Untuk isu perbatasan, umumnya wilayah perbatasan dianggap sebagai daerah tertinggal, dan sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. Hal ini menjadi tantangan lain bagi hubungan dua negara, karena kondisi perbatasan menunjukkan kegagalan kedua negara memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta kondisi geografis yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk perbatasan.

Kerja sama di bidang perdagangan juga perlu menjadi perhatian kedua negara. Malaysia telah lama menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia. Sebagai negara tetangga, Malaysia merupakan tujuan ekspor dari produk-produk Indonesia. Kontribusi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan berbagai sektor di Malaysia sangat besar. Tentu hal ini merupakan pendorong bagi Indonesia untuk tetap menjaga neraca perdagangan tetap surplus dengan Malaysia. Dengan pola kerja sama yang baik dan saling menguntungkan di masa mendatang, pola kerja sama bilateral memiliki

peluang yang besar di bawah pemerintah PM Anwar Ibrahim dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tentunya akan bermanfaat bagi kedua negara.

Penutup

Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM diharapkan membawa perubahan dan perbaikan bagi Malaysia yang dalam beberapa tahun terakhir dihadapkan pada situasi politik dan ekonomi dalam negeri yang tidak kondusif. Hasil pemilu Malaysia kali ini, yang mengantarkan Anwar Ibrahim sebagai PM, dapat dipahami sebagai kompromi politik terbaik dalam upaya Malaysia bangkit dari keterpurukan politik dan berbagai persoalan ekonomi di dalam negeri. Setidaknya, dengan tampilnya Anwar Ibrahim sebagai PM, dan dengan melibatkan berbagai kekuatan politik dalam negeri dalam pemerintahannya, Malaysia memiliki kesempatan untuk bangkit dan berupaya maju secara ekonomi dan politik. Hal ini menjadi tantangan bagi Anwar Ibrahim sebagai PM yang telah berkomitmen sesuai janjinya yang akan berupaya menyejahterakan rakyatnya.

Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM juga menjadi momentum bagi upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Hubungan baik yang telah terbina antara Anwar Ibrahim dengan berbagai tokoh Indonesia diharapkan dapat bermanfaat untuk mempererat hubungan serta kerja sama antarkedua negara. Kedua negara perlu membuat program kerja sama untuk kepentingan bilateral serta kemajuan kawasan. Jika hubungan Indonesia dan Malaysia semakin kuat, kedua negara dapat menjadi

pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dan terpeliharanya stabilitas di kawasan (ASEAN). DPR RI melalui fungsi pengawasan harus ikut mengawal dan memastikan bahwa kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dapat membawa kemajuan bagi kedua bangsa dan kawasan.

Referensi

- “Anwar Ibrahim Siap Pererat Hubungan dengan Indonesia”, <https://www.republika.id/posts/34767/anwar-ibrahim-siap-pererat-hubungan-dengan-indonesia>, diakses 30 November 2022.
- “Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia, Akhir Kisah Dramatis 24 Tahun”, <https://www.kompas.com/global/read/2022/11/24/163400970/anwar-ibrahim-perdana-menteri-malaysia-akhir-kisah-dramatis-24-tahun?page=all>, diakses 30 November 2022.
- “Kabinet Baru Malaysia Dilantik, Anwar Rangkap Menkeu”, *Media Indonesia*, 4 Desember 2022, hal. 4.
- “Pemilu Malaysia, Polisi Memperingatkan Soal Ketegangan Etnis di Media Sosial”, tempo.co.id, 22 November 2022, <https://tempo.co/read/1659730/pemilu-malaysia-polisi-memperingatkan-soal-ketegangan-etnis-di-media-sosial>, diakses 26 November 2022.
- “Pemilu Malaysia: Muhyiddin Akui Kalah dan Ucapkan Selamat ke Anwar”, *Ibrahim*, <https://www.kompas.com/global/read/2022/11/25/213200970/pemilu-malaysia--muhyiddin-akui-kalah-dan-ucapkan-selamat-ke-anwar>, diakses 29 November 2022.

"Pemilu Malaysia Berakhir dengan Parlemen Gantung. Apa Selanjutnya?", <https://www.tempo.co/abc/8057/pemilu-malaysia-berakhir-dengan-parlemen-gantung-apa-selanjutnya>, diakses 28 November 2022.

"Presiden Jokowi Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM Malaysia", setkab.go.id, 25 November 2022,

<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-ucapkan-selamat-atas-terpilihnya-anwar-ibrahim-sebagai-pm-malaysia/>, diakses 28 November 2022.



Sita Hidriyah
sita.hidriyah@dpr.go.id

Sita Hidriyah, S.Pd.,M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Muda pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Upaya Pemerintah dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Pengentasan Kemiskinan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" (2013), "Pengungsi Suriah dan Respons Internasional dan Asian Parliamentary Assembly (APA)" (2016), dan "Tantangan Kerjasama Indonesia dan Jepang Dalam Diplomasi Ekonomi " (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.